

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang mendesak di Indonesia dan masih sulit untuk ditangani. Jumlahnya yang terus mengalami peningkatan signifikan sebagai akibat dari berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, proses urbanisasi yang intensif, serta perubahan dalam pola konsumsi masyarakat yang semakin bergantung pada produk sekali pakai dan barang-barang modern (Ince, 2025). Fenomena ini tidak hanya mencerminkan dinamika sosial-ekonomi negara, tetapi juga menunjukkan bagaimana aktivitas manusia yang tidak terkendali dapat memperburuk kondisi lingkungan secara keseluruhan. Menurut data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) diperkirakan menghasilkan sekitar 36.54 juta ton sampah pada tahun 2024 di mana mayoritas volume tersebut berasal dari wilayah perkotaan yang padat penduduk dan aktivitas industri, namun sayangnya, sebagian besar sampah ini belum dikelola secara efektif dan efisien (Tuhumury et al., 2024)

Tanjungpinang sebagai salah satu kota di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat dan aktivitas ekonomi yang semakin berkembang (Hani & Safitri, 2019). Kenaikan jumlah penduduk ini secara langsung memicu peningkatan dalam volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya (Simbolon et al., 2023). Pertumbuhan jumlah penduduk ini dapat dilihat dari data yang

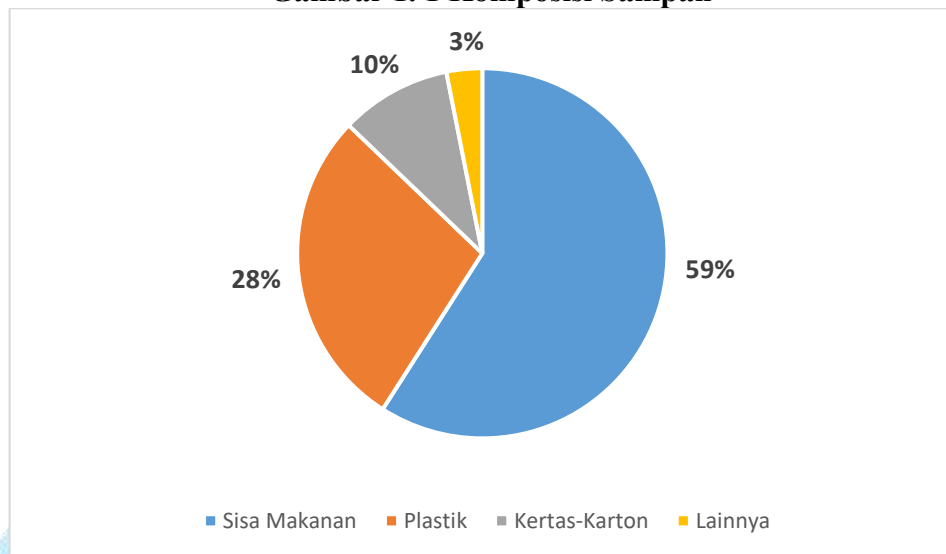
memperlihatkan adanya peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2024, seperti yang ada pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1 Pertumbuhan Jumlah Penduduk di Kota Tanjungpinang

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Ribu)
1.	2022	239.854
2.	2023	234.800
3.	2024	237.400
4.	2025	240.000

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang (Diolah Peneliti 2025)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Kota Tanjungpinang mengalami perubahan dari tahun 2022 hingga 2025. Pada tahun 2022, jumlah penduduk mencapai 239.854 ribu jiwa, kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 234.800 ribu jiwa. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah penduduk kembali bertambah menjadi 237.400 ribu jiwa, dan peningkatan tersebut terus berlanjut hingga tahun 2025 dengan total penduduk mencapai 240.000 ribu jiwa. Hal ini tentunya akan menambah jumlah sampah yang diproduksi masyarakat Kota Tanjungpinang secara pesat. Menurut data pada Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2024, timbulan sampah harian melonjak dan mencapai angka tertinggi yaitu 155,97 ton dan timbulan sampah tahunan sebesar 56,930.51 ton. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pengelolaan sampah di kota ini masih menghadapi tantangan.

Gambar 1. 1 Komposisi Sampah

Sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)

Dari Gambar 1.1 menunjukkan bahwa komposisi sampah yang ada di Kota Tanjungpinang pada tahun 2024, terungkap sampah makanan menduduki tempat pertama sebesar 59%, selanjutnya disusul sampah plastik yang berjumlah 28% dari total sampah yang dihasilkan. Tingginya angka pada jumlah plastik ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada plastik sekali pakai. Banyak pihak yang terlibat dalam fenomena ini, termasuk pemerintah kota (terutama Dinas Lingkungan Hidup), bisnis modern dan tradisional, bank sampah, dan masyarakat sebagai produsen dan pengelola sampah rumah tangga. Dengan demikian, solusi yang efektif, memerlukan pendekatan komprehensif dan kolaborasi aktif dari semua pihak yang terkait dalam waktu bersamaan. Hal ini didukung dengan penelitian (Putri, 2025) yang menyoroti pentingnya kolaborasi multistakeholder untuk mengelola sampah di kota parepare.

Secara lebih mendalam, sampah plastik di Kota Tanjungpinang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap berbagai masalah lingkungan, dengan efek negatif yang mencakup polusi laut, kematian hewan liar, serta gangguan terhadap kesehatan manusia apabila tidak ditangani secara tepat (Ikhwan et al., 2021). Bahan plastik yang sulit terurai mampu mencemari ekosistem selama berabad-abad, sehingga memicu masuknya mikroplastik ke dalam rantai makanan dan meningkatkan potensi risiko penyakit kronis pada manusia (Suryatini et al., 2024). Di Tanjungpinang, yang merupakan kota pantai, sampah plastik sering kali terbawa oleh arus laut, yang semakin memperburuk keadaan terumbu karang dan keragaman hayati di sekitarnya. Kondisi ini tidak hanya mengancam ekosistem laut tetapi juga berdampak ekonomi, seperti penurunan produktivitas perikanan dan kerugian bagi sektor pariwisata, sehingga memerlukan tindakan pencegahan yang lebih intensif untuk melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Upaya dalam menanggulangi persoalan sampah plastik sudah dilakukan melalui Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022 mengenai pengurangan sampah plastik. Kebijakan ini dibuat untuk meminimalisir dampak negatif dari dampak plastik dan dirancang secara operasional untuk mewajibkan seluruh pelaku usaha khususnya yang beroperasi dipusat perbelanjaan dan toko modern untuk menyediakan dan menggunakan kantong belanja ramah lingkungan, baik yang berbahan dasar mudah terurai dan penggunaan jangka panjang. Meskipun Peraturan Walikota Nomor 14

Tahun 2022 telah di implementasikan namun belum efektif dalam menanggulangi peningkatan sampah plastik, karena dari data komposisi sampah masih menunjukkan bahwa sampah plastik pada tahun 2024 menyumbang 28% dari total komposisi sampah yang ada di Kota Tanjungpinang. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Rauf (2025) yang menunjukkan bahwa masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi, lemahnya ketegasan pemerintah dalam menegakkan aturan, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan perilaku usaha dalam mengubah perilaku konsumsi plastik.

Kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan kerap terjadi bukan hanya karena substansi kebijakan itu sendiri, namun bisa disebabkan oleh prosesnya yang tidak tepat. Proses masuknya kebijakan ini merujuk pada teori Multiple Streams Kingdon yang membahas bahwa jika tiga aliran problem stream (masalah yang diakui), policy stream (solusi kebijakan yang tersedia), dan politics stream (dukungan politik) bertemu di ruang kebijakan yang tepat. Pada konteks penelitian ini, peningkatan limbah plastik sebagai aliran masalah, peraturan Walikota No.14 Tahun 2022 sebagai aliran kebijakan, dan komitmen pemerintah daerah sebagai aliran politik. Ketiganya menciptakan peluang kebijakan (policy window) yang memungkinkan masalah ini menjadi prioritas agenda publik, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Putri et al., 2025) di kota Palu yang menunjukkan bagaimana isu sampah plastik berubah dari masalah pribadi menjadi masalah institusional berkat partisipasi pemerintah, media, dan

masyarakat. Proses penggabungan ketiga arus tersebut membutuhkan keterlibatan aktor yang memiliki pemahaman untuk mempertemukan ketiga arus yang disebut sebagai policy entrepreneur.

Celah ini menjadi dasar kuat bagi penelitian ini, karena sejauh ini belum ada studi yang menjelaskan secara komprehensif bagaimana Pemerintah Kota Tanjungpinang membangun dan mengangkat isu sampah plastik sebagai prioritas kebijakan daerah melalui proses komunikasi kebijakan, tekanan publik, serta dinamika kepentingan politik lokal. Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman bahwa efektivitas kebijakan publik tidak hanya bergantung pada substansi maupun implementasinya, tetapi juga pada proses bagaimana isu tersebut diperjuangkan agar mendapat perhatian dan direspons oleh para pengambil keputusan. Dengan menelaah proses penentuan agenda kebijakan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor strategis di balik lahirnya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 14 Tahun 2022, yang sejauh ini belum banyak dijelaskan secara ilmiah.

Hasil kajian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam memperluas pemahaman mengenai dinamika kebijakan lingkungan di daerah kepulauan, di mana kondisi geografis, sosial, dan politik memainkan peranan besar dalam menentukan apakah suatu isu publik dapat diakomodasi dalam kebijakan atau justru terabaikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan literatur akademik di bidang kebijakan pengelolaan sampah, tetapi juga memiliki

nilai aplikatif bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penetapan agenda kebijakan yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi keberlanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, ditemukan permasalahan, yaitu:

1. Siapakah policy entrepreneur yang mengusulkan masuknya isu pengurangan kantong plastik pada agenda setting kota Tanjungpinang?
2. Bagaimana proses yang dilalui sehingga isu pengurangan kantong plastik masuk sebagai sebuah kebijakan?
3. Strategi apa yang digunakan oleh policy entrepreneur sehingga isu pengurangan kantong plastik masuk sebagai agenda kebijakan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui siapakah policy entrepreneur yang mengusulkan masuknya isu pengurangan kantong plastik pada agenda setting kota Tanjungpinang.
2. Untuk melihat proses yang dilalui sehingga isu pengurangan kantong plastik masuk sebagai sebuah kebijakan.
3. Untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh policy entrepreneur sehingga isu pengurangan kantong plastik masuk sebagai agenda kebijakan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik yang memperluas pemahaman tentang bagaimana masalah diakui, ketersediaan solusi kebijakan, dan dukungan politik berkontribusi pada masalah lingkungan perkotaan melalui penerapan studi empiris tentang proses penetapan agenda di tingkat kota, khususnya dalam konteks kebijakan pengurangan sampah plastik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam memahami peran aktor, proses, dan strategi dalam penetapan agenda kebijakan, khususnya terkait kebijakan pengurangan sampah plastik.